

BAB I

PENDAHULUAN

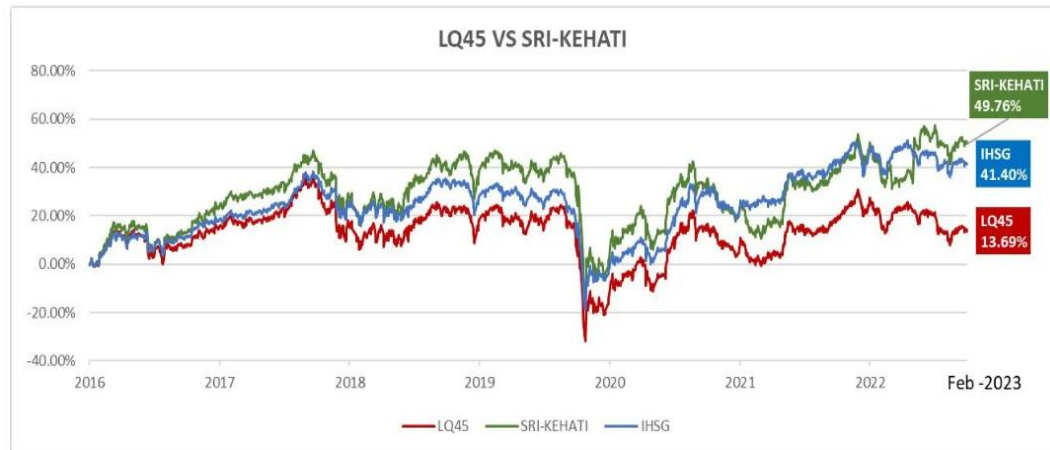
1.1 Latar Belakang

Isu keberlanjutan (*sustainability*) saat ini menjadi perhatian global seiring meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas bisnis. Entitas bisnis dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek Lingkungan (*Environmental*), Sosial (*Social*), dan Tata Kelola yang baik (*Governance*) atau lebih dikenal dengan istilah ESG. Di Indonesia, penerapan prinsip ESG mulai mendapat perhatian seiring dengan adanya dorongan dari investor dan sebagai upaya untuk mendukung agenda global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Paris Agreement* (UNEP Finance Initiative, The UN Global Compact, 2006). Namun, dalam penerapan prinsip ESG yang mengadopsi standar internasional, perlu adanya penyesuaian secara lokal melalui integrasi terhadap Pancasila yang mencerminkan identitas bangsa. Melalui penelitian ini, akan dikaji secara mendalam bagaimana internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam laporan keberlanjutan yang mengungkapkan penerapan prinsip ESG pada entitas bisnis di Indonesia sebagai upaya mewujudkan akuntansi keberlanjutan berbasis pancasila.

Environmental, Social, and Governance (ESG) pertama kali dikenal secara luas pada tahun 2004 melalui laporan “*Who Cares Wins*” oleh PBB dan institusi keuangan global. Laporan ini berisi tentang pedoman dan rekomendasi untuk mengintegrasikan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola secara efektif dalam proses

pengambilan keputusan investasi (UN Global Compact, 2004). Pada tahun 2015, ESG semakin kuat dengan hadirnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicetuskan oleh PBB dan *Paris Agreement* tentang perubahan iklim. Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung dua agenda global tersebut telah mendorong penerapan prinsip ESG pada entitas bisnis salah satunya dengan diterbitkannya Roadmap Keuangan Berkelanjutan sejak tahun 2015 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2019 entitas bisnis di Indonesia dihimbau untuk menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) meskipun sifatnya masih sukarela.

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung penerapan prinsip ESG di Indonesia melalui peluncuran berbagai indeks yang mengukur kinerja keberlanjutan entitas bisnis tercatat. Salah satu yang paling dikenal dan telah menjadi acuan adalah Indeks SRI-KEHATI (*Sustainable and Responsible Investment*-Yayasan Keanekaragaman Hayati) yang merupakan hasil kerja sama BEI dengan Yayasan KEHATI. Indeks ini bertujuan untuk menyeleksi emiten berdasarkan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola yang bertanggung jawab. Secara historis, indeks SRI-KEHATI telah menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa indeks utama seperti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), LQ45, dan lain sebagainya. Capaian ini memperkuat prinsip *Triple Bottom Line* (*Profit, People, Planet*), bahwa keuntungan yang bersifat berkelanjutan dapat dicapai dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.



Gambar 1. 1 Grafik Kinerja Indeks SRI-KEHATI, IHSG, LQ45

Sumber: Yayasan KEHATI, (2024)

Indonesia sebagai negara yang memiliki dasar ideologi Pancasila sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan model ESG yang khas dan relevan secara kultural. Faktanya, ESG baru mulai menjadi perhatian secara global sejak tahun 2015, sedangkan Indonesia telah memiliki Lima Dasar Etika dalam Pancasila sejak tahun 1945. Setiap sila dalam Pancasila memuat nilai-nilai fundamental yang selaras dengan tiga pilar ESG. Misalnya, sila kedua dan kelima mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial dan kelestarian lingkungan; sila keempat menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan demokratis dalam pengambilan keputusan sebagai wujud dari *good governance* dalam ESG. Integrasi Akuntansi Pancasila ke dalam praktik ESG bukan hanya relevan secara moral, tetapi juga strategis dalam memperkuat karakter keberlanjutan bisnis di Indonesia.

Permasalahan utama dalam praktik akuntansi keberlanjutan di Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila belum secara eksplisit dijadikan sebagai dasar dalam

praktik pelaporan keberlanjutan. Saat ini, standar pelaporan keberlanjutan di Indonesia masih sangat bergantung pada standar internasional, seperti standar GRI (*Global Reporting Initiative*), standar SASB, standar TCFD dan standar lainnya. Ketergantungan pada standar tersebut menimbulkan celah dalam identitas ideologis bangsa. Akibatnya, laporan keberlanjutan di Indonesia cenderung seragam secara teknis tetapi tidak memiliki nilai lokal yang menjadi ciri khas Indonesia, padahal Pancasila sebagai dasar kebijakan nasional seharusnya dapat menjadi identitas etis dan sosial dalam praktik bisnis Indonesia.

Akuntansi merupakan *language of business* yang mengkomunikasikan informasi kepada pemangku kepentingan, sehingga perannya tidak terbatas pada laporan keuangan semata, melainkan juga mencerminkan pertanggungjawaban atas keseluruhan aktivitas bisnis (Warren, dkk., 2016). Akuntansi keberlanjutan berperan penting sebagai alat pertanggungjawaban dari dampak ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola dari aktivitas bisnis secara transparan dan beretika. Namun, hingga saat ini belum terdapat kerangka fundamental akuntansi keberlanjutan di Indonesia yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etik dan filosofis pelaporan. Pendekatan Akuntansi Keberlanjutan berbasis Pancasila, sebenarnya menawarkan potensi untuk menjadikan pelaporan keberlanjutan tidak hanya sekadar kepatuhan teknis, tetapi juga refleksi tanggung jawab moral dan kebangsaan.

Ketiadaan integrasi antara nilai-nilai Pancasila dengan prinsip ESG juga berdampak pada entitas bisnis yang masih menjalankan pelaporan keberlanjutan sebagai rutinitas administratif, bukan sebagai cerminan tanggung jawab moral dan

sosial yang tulus. Hal ini membuka peluang terjadinya praktik *greenwashing*, yaitu tindakan entitas bisnis dalam menyampaikan informasi keberlanjutan tidak sesuai dengan praktik sebenarnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana Akuntansi Keberlanjutan berbasis Pancasila dapat dikembangkan sebagai dasar etis untuk memperkuat keterkaitan antara praktik ESG dan identitas ideologis bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi kemungkinan integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kerangka ESG, serta mendorong gagasan normatif untuk mengembangkan pembentukan sistem pelaporan keberlanjutan yang tidak hanya global dalam bentuk, tetapi juga mengandung nilai lokal (Veldhuizen 2021).

Menurut Sitorus (2015), akuntansi bukan sekadar alat ekonomi, tetapi juga sarana untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Akuntansi berbasis Pancasila lebih menekankan pertanggungjawaban kepada Tuhan, penghormatan terhadap manusia, semangat persaudaraan, pengangkatan derajat rakyat, serta keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani dalam aktivitas keuangan. Penelitian oleh Girindratama dan Putra (2024) mendukung gagasan tersebut dengan menunjukkan bahwa praktik akuntansi berbasis nilai-nilai Pancasila terbukti mampu menjaga keberlanjutan usaha UMKM di kota Surabaya. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan tidak hanya membentuk dasar aktivitas keuangan, tetapi juga mempererat hubungan sosial, menciptakan loyalitas pelanggan, dan membangun lingkungan usaha yang humanis serta berkelanjutan.

Selain itu, perhatian terhadap tanggung jawab sosial pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar BEI tahun 2019-2021, juga terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap profitabilitas, karena dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan dan keuntungan usaha (Ningrum, Gunariato, dan Hasan 2024). Fenomena serupa juga ditemukan di berbagai negara. Di Pakistan, sebagai negara dengan populasi mayoritas religius seperti Indonesia, religiusitas dan budaya terbukti berdampak positif terhadap penerapan tanggung jawab sosial serta peningkatan kinerja perusahaan (Hunjraddkk. 2021). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dan keagamaan berpengaruh terhadap sikap manajemen dalam menjalankan aktivitas CSR. Sementara itu, di negara-negara Eropa, penerapan prinsip keberlanjutan seperti pelestarian lingkungan, penilaian risiko iklim, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui prinsip ESG telah terbukti mampu meningkatkan stabilitas strategi keuangan perusahaan (Alexandra, Svetlana, dan Alexander 2024).

Upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ke dalam prinsip keberlanjutan yang berstandar global menjadi landasan penting dilakukannya penelitian yang berjudul Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penerapan Prinsip ESG pada Entitas Bisnis di Indonesia Menuju Akuntansi Keberlanjutan Berbasis Pancasila. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara konseptual maupun praktis untuk membangun akuntansi yang tidak hanya sesuai standar internasional, tetapi juga mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, integrasi ESG dan Pancasila bukan hanya mungkin

dilakukan, melainkan sebuah keharusan untuk mewujudkan operasional bisnis yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini menekankan pada eksplorasi secara mendalam mengenai integrasi nilai-nilai Pancasila dalam penerapan prinsip ESG pada entitas bisnis di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan terhadap akuntansi keberlanjutan yang berlandaskan pada Pancasila. Dengan demikian, sebagai upaya untuk mencapai pemahaman tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana entitas bisnis yang terdaftar dalam indeks SRI-KEHATI mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam penerapan prinsip ESG, baik dalam pengungkapan laporan keberlanjutan maupun dalam praktik akuntansi keberlanjutan yang mencakup aspek pengukuran, pengakuan, dan penyajian informasi keberlanjutan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian tersebut, secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah tercermin atau belum tercermin di dalam laporan keberlanjutan entitas bisnis di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini memiliki dua tujuan: pertama, untuk mengidentifikasi bentuk keselarasan antara nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip ESG yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan entitas bisnis di Indonesia. Kedua, untuk mengeksplorasi bentuk internalisasi nilai-nilai Pancasila

yang direfleksikan dalam elemen-elemen akuntansi keberlanjutan terutama dari segi pengukuran, pengakuan, dan penyajiannya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, praktik bisnis, dan masyarakat luas baik secara teoritis, praktis, maupun sosial.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka konseptual akuntansi keberlanjutan yang lebih relevan dengan nilai-nilai lokal Indonesia;
2. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi nilai-nilai filosofis bangsa dapat diadaptasi dalam standar pelaporan global;
3. Menjadi landasan dalam pengembangan metodologi baru untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan wawasan dan panduan praktis bagi entitas bisnis untuk mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila sudah diinternalisasikan atau dapat dioptimalkan dalam strategi dan praktik pelaporan ESG;
2. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan regulator dalam merumuskan kebijakan dan standar pelaporan keberlanjutan yang mengintegrasikan nilai Pancasila;
3. Membantu para pemangku kepentingan dalam memahami sejauh mana entitas bisnis telah menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam operasional dan

pelaporannya untuk mendukung pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan beretika.

1.4.3 Manfaat Sosial

1. Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong entitas bisnis untuk menjalankan bisnis berkelanjutan yang menjunjung tinggi nilai Pancasila;
2. Mendukung pembangunan ekonomi yang tidak hanya mementingkan aspek finansial, lingkungan dan sosial, tetapi juga selaras dengan tanggung jawab berbasis budaya dan ideologi bangsa;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap entitas bisnis dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik melalui akuntansi keberlanjutan yang mencerminkan nilai Pancasila.